

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA  
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**RENJA KERJA  
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI  
KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024**



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

## Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD yang bersifat indikatif.

## Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. bab I memuat pendahuluan;

- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. dinas pendidikan;
  - b. dinas kesehatan;
  - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
  - f. badan penanggulangan bencana Daerah;
  - g. dinas sosial;
  - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
  - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - j. dinas ketahanan pangan;
  - k. dinas lingkungan hidup;
  - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. dinas perhubungan;
  - n. dinas komunikasi dan informatika;
  - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
  - s. dinas pertanian;
  - t. sekretariat Daerah;
  - u. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - v. Bappeda;
  - w. badan keuangan Daerah;
  - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - y. inspektorat;
  - z. kecamatan payakumbuh utara;
  - aa. kecamatan payakumbuh barat;
  - bb. kecamatan payakumbuh timur;
  - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
  - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
  - ee. kantor kesbangpol
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.  
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 7

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori tahun 2024.

Rencana kinerja Kecamatan Lamposi tigo nagori Tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana tahunan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 ,semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dimasa yang akan datang pada khususnya

Demikian Rencana kerja ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi yang memerlukan.

Payakumbuh, Agustus 2023  
Camat Lamposi Tigo Nagori,



**DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP**

NIP. 198504262003121001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    LANDASAN HUKUM .....	2
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>7</b>
2.1    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DANCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	8
2.2    ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	26
2.3    ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKATDAERAH .....	40
2.4    REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	42
2.5    PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	55
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>58</b>
3.1    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	58
3.2    TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI .....	47
3.3    PROGRAM DAN KEGIATAN.....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 KOTA PAYAKUMBUH.....	9
Tabel 2.2	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	39
Tabel 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA PAYAKUMBUH .....	43
Tabel 2.4	PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .....	56
Tabel 2.5	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 .....	57
Tabel 3.1	PERSANDINGAN ANTARA PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI, KOTA DENGAN USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	58
Tabel 3.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI.....	60
Tabel 3.3	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 .....	62
Tabel 4.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 .....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SESUAI SUMBER PENDANAAN  
Matrik Definisi Operasional Kegiatan / Sub Kegiatan

GAB / GBS 2024

RKT 2024

CACADING 2024

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan informasi mengenai Kecamatan secara utuh akan potensi wilayah maupun kondisi masyarakatnya, yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjabarkan dan menyusun program dan kegiatan pembangunan yang strategis. Visi dan Misi kepala daerah yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, diuraikan dalam tahapan jangka pendek tahunan dengan menyandingkan antara tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur pembangunan di Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori. Sehingga Tugas pokok dan Fungsi di tiap Sub Bagian dan tiap seksi merupakan uraian rinci dan ringkas pembentuk capaian indikator Kecamatan. Dengan Kebersamaan masing-masing anggota melengkapi dan menutupi kekurangsempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian

kegiatan maupun cara pelaksanaannya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

Penyusunan Rencana Kerja Lamposi Tigo Nagori tahun 2024 tidak terlepas dari peristiwa Pemilihan umum serentak pada tahun 2024, baik dari segi kebijakan dan penganggaran yang merujuk pada tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
  24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
  25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

- Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
  28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
  29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
  30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 54).
  31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
  32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
  33. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);
  34. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)
  35. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
  36. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 4

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Agenda Prioritas Kota Payakumbuh yang ke-12 "Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan";
2. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yangberkelanjutan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviuw terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **Bab III.Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Nasional,Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah Program dan Kegiatan.

#### **Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan tentang usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2024

#### **Bab V. Penutup**

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 adalah penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori 2023-2026. Perencanaan kerja tersebut tidak luput dari proses evaluasi dari pelaksanaan di tahun sebelumnya, sehingga dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini disajikan berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori selama tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sampai dengan tahun 2022, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D  
TAHUN 2022 KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	84	2.572.604.662	84	2.430.400.147												-		2.430.400.147		
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos, cek giro	450 lembar	11.092.000	450 lembar	11.028.000											-	450 lembar	11.028.000		99,42
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan internet, air, listrik yang dibayar	16 rek	108.655.047	16 rek	105.223.481											-	16 rek	105.223.481		96,84
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tabung racun api yang diisi, jumlah spanduk	2 jenis	14.209.000	2 jenis	13.733.500											-	2 jenis	13.733.500		96,65
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	16 unit	10.966.500	16 unit	10.470.350											-	16 unit	10.470.350		95,48

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	5	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Jumlah ASN yang telah dibayarkan jasa pengelolaan administrasi keuangan	29 orang	710.904.920	29 org	704.245.320												29 orang	704.245.320		99,06	
	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan yang dibayar	22 jenis	138.317.952	22 jenis	137.177.648												22 jenis	137.177.648		99,18	
	7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	6 jenis	47.493.950	6 jenis	47.443.872												6 jenis	47.443.872		99,89	
	8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis atk yang disediakan	45 jenis	104.451.935	45 jenis	103.291.765												45 jenis	103.291.765		98,89	
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis yang dicetak digandakan dan jumlah yang dijilid	5 jenis	56.996.375	5 jenis	53.329.445												5 jenis	53.329.445		93,57	
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	8 jenis	16.192.500	8 jenis	16.191.250												8 jenis	16.191.250		99,99	
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2 jenis	301.845.930	2 jenis	198.138.330												2 jenis	198.138.330		65,64	
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2 jenis	70.980.000	2 jenis	53.950.600												2 jenis	53.950.600		76,01	
	13	Penyediaan Makan dan Minum	jumlah jenis surat kabar yang	2 jenis	322.219.900	2 jenis	322.091.940												2 jenis	322.091.940		99,96	

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			disediakan																				
	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah air galon/kotak, porsi makanan dan snack yang disediakan	720	547.590.846	720	543.744.864												720		99,30		
	15	Penyediaan Tenaga Administrasi dan teknis Perkantoran	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	12	110.687.807	12	110.339.782												12		99,69		
	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	80 %	2.102.252.195	80%	2.096.707.693													2.096.707.693	99,74		
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	6	115.023.000	6	114.000.000												6		99,11		
	2	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah rehabilitasi gedung kantor yang diberikan	1	91.545.554	1	91.545.554													91.545.554	100,00		
	3	pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah kantor yang diberikan pemeliharaan	7	70.709.000	7	69.281.000												7		97,98		
	4	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	1	873.925.966	1	873.925.966												0		100,00		
	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	17 unit roda 2, i unit rida 4	19	376.077.175	19	372.983.673												18		99,18		

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	7	Pelaksanaan Pengadaan tanah	jumlah pengadaan yang diadakan	1	574.971.500	1	574.971.500											0	574.971.500		100,00		
	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		82.135.200		81.129.400											-	81.129.400		98,78		
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	46 stel	45 stel	82.135.200	45 stel	81.129.400											45 stel	81.129.400		98,78		
	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi tigo nagori oleh inspektorat	A	45.713.225	A	44.826.425											-	44.826.425		98,06		
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 dok	18.929.515	4 dok	18.327.615											-	18.327.615		96,82		
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	4 Dokumen	4 dok	26.783.710	4 dok	26.498.810											-	26.498.810		98,94		
	I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	89			89											-	-				

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja program kegiatan		17.098.900		6.388.000	95 %	8.549.450		1.485.000		606.400		3.689.300		1.538.100		7.318.800		13.706.800		80,16
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen yang disusun	4 Dok	9.249.380	4 Dok	3.522.000	4 Dok	4.624.690	4 Dok	1.485.000	4 Dok	492.600	4 Dok	1.837.500	4 Dok	140.000	4 Dok	3.955.100		7.477.100		80,84
	2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen yang disusun	4 Dok	3.924.760	8 Dok	1.797.000	4 Dok	1.962.380		-	4 Dok	113.800	4 Dok	253.000	4 Dok	1.398.100	4 Dok	1.764.900		3.561.900		90,75
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen yang disusun	2 Dok	3.924.760	2 Dok	1.069.000	2 Dok	1.962.380		-		-	2 Dok	1.598.800		-	2 Dok	1.598.800		2.667.800		67,97
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan terhadap aliran kas		9.409.338.282		4.259.557.111	90 %	4.732.373.834		844.339.050		1.151.383.363		1.157.726.326		1.109.402.239		4.262.850.978		8.522.408.089		90,57
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	225 org	9.405.413.522	44 Org	4.256.246.551	44 Orang	4.730.411.454	44 Org	844.339.050	44 Org	1.151.383.363	44 Org	1.157.403.526		1.108.038.239	44 Orang	4.261.164.178		8.517.410.729		90,56
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Keuangan yang disusun	5 Dok	3.924.760	5 Dok	3.310.560	5 Dok	1.962.380		-		-	5 Dok	322.800	5 Dok	1.364.000	5 Dok	1.686.800		4.997.360		127,33
	3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jenis layanan kepegawaian yang diberikan		500.000		-																0,00

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	44 stel	500.000		-		-													0,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang disediakan		325.777.350		155.644.121		177.727.355		19.221.550		21.683.408		54.828.767		64.718.650		160.452.375		316.096.496		97,03	
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan	9 jenis	8.064.800	9 jenis	3.773.552	9 jenis	4.032.400			9 jenis	2.026.000	9 jenis	1.658.100	9 jenis	3.684.100		7.457.652				92,47	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	7.084.230			1 paket	7.084.230					1 paket	6.100.000	1 paket	6.100.000		6.100.000				86,11
	3	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.500.000			1 paket	4.500.000					1 paket	4.470.000	1 paket	4.470.000		4.470.000				99,33
		4	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	18 jenis	138.587.620	3 jenis	73.201.169	3 jenis	75.579.375	3 jenis	10.793.200	3 jenis	8.039.650	3 jenis	31.493.265	3 jenis	20.123.200	3 jenis	70.449.315		143.650.484	
	5		5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	18 jenis	25.049.560	3 jenis	11.778.300	3 jenis	12.524.780	3 jenis	1.598.900	1 jenis	1.236.600	1 jenis	2.725.675	3 jenis	4.524.300	3 jenis	10.085.475		21.863.775	
		6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	12135 eksemplar	28.687.140	2427 eksemplar	14.762.000	2 jenis	14.343.570	2 jenis	2.420.000	2 jenis	3.630.000	2 jenis	3.630.000	2 jenis	4.660.000	2 jenis	14.340.000		29.102.000	

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	475 kali	113.804.000	8 kali	52.129.100	20 kali	59.663.000	1 kali	4.409.450	1 kali	8.777.158	2 kali	14.953.827	16 kali	23.183.050	20 kali	51.323.485		103.452.585		90,90
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jenis pengadaan yang diadakan		11.000.000		5.500.000		40.251.670		-		-		-		37.000.000		37.000.000		42.500.000		386,36
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	500.000		-																0,00
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mobilair yang diadakan	2 jenis	500.000		-	2 unit	3.000.000							2 unit	3.000.000	2 unit	3.000.000		3.000.000		600,00
	3	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	500.000		-	1 jenis	2.951.770				-										0,00
	4	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4 unit	500.000		-	1 dokumen	34.299.900				-			1 dokumen	34.000.000	1 dokumen	34.000.000		34.000.000		6800,00
	5	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis pengadaan yang diadakan	5 unit	9.000.000	1 unit	5.500.000		-				-								5.500.000		61,11
	6	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan kecamatan lamposi tigo nagori yang disediakan		163.695.456		78.067.734		84.247.848		13.660.102		16.917.150		18.281.322		26.251.768		75.110.342		153.178.076		93,58
	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah benda Pos dan cek yangh dibeli	2500 Bu	4.656.000	288 buah	1.799.000	92 buah	920.000			50 buah	500.000			42 buah	420.000	92 buah	920.000		2.719.000		58,40

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				ah																			
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening air, telepon, listrik yang dibayarkan	80 rek	57.984.000	16 Rek	27.231.716	3 jenis	32.572.000	3 jenis	5.435.006	3 jenis	4.520.506	3 jenis	5.936.178	3 jenis	9.172.972	3 jenis	25.064.662		52.296.378		90,19
	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah honor THL dan iuran Asuransi yang dibayarkan	10 orang	101.055.456	2 orang	49.037.018	2 orang	50.755.848	2 orang	8.225.096	2 orang	11.896.644	2 orang	12.345.144	2 orang	16.658.796	2 orang	49.125.680		98.162.698		97,14
	7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik		261.726.500		128.545.587		147.622.340		17.707.802		23.641.810		28.458.669		67.150.709		136.958.990		265.504.577		101,44
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	120 unit	211.200.000	24 unit	100.704.587	24 unit	105.600.000	24 unit	17.707.802	24 unit	23.262.210	24 unit	27.958.669	24 unit	28.166.604	24 unit	97.095.285		197.799.872		93,66
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dibayarkan	20 jenis	18.526.500	2 jenis	12.027.000	4 jenis	9.263.250		-	1 jenis	379.600	1 jenis	500.000	2 jenis	6.404.000	4 jenis	7.283.600		19.310.600		104,23
	3	Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	35 unit	32.000.000	7 unit	15.814.000	4 unit	32.759.090		-					4 unit	32.580.105	4 unit	32.580.105		48.394.105		151,23

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)			
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	V	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Nilai IKM	84	4.161.987.317	84	4.028.342.251																		
		1	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah jenis perlengkapan ruangan PATEN, jumlah jenis pelayanan yang diberikan	12 jenis	29.455.000	12 jenis	28.270.000																	
		2	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Sungai durian	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan	12 bln	267.188.982	12 bln	239.576.998																	
		3	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Padang Sikabu	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan	12 bln	241.772.123	12 bln	226.659.422																	
		4	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Parik Muko Aia	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan	12 bln	227.144.047	12 bln	242.875.051																	
		5	Penunjang Operasional Pemerintahan KelurahanKoto Panjang dalam	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan	12 bln	243.347.583	12 bln	216.833.187																	

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	6	Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kota Panjang Padang	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan	12 bln	215.740.279	12 bln	238.572.068													238.572.068		110,58	
		Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan parambahan	Jumlah jenis operasional kelurahan yang dilakukan	12 bln	244.845.095	12 bln	210.693.470													210.693.470		86,05	
		Koordinasi dan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Jumlah monitoring yang dilakukan	48 kali	107.323.350	48 kali	107.077.340													107.077.340		99,77	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang diadakan	6 keg	1.828.377.455	6 keg	1.776.045.837													1.776.045.837		97,14	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan	6 keg	756.793.403	6 keg	741.738.878													741.738.878		98,01	

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	. Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase Masyarakat Yang Menyampaikan Usulan Dalam Musrenbang Kecamatan					1. 100% 2. 75 %																
				1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		40.501.220		15.285.200		18.090.430		17.229.000							17.229.000		32.514.200		80,28
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	40.501.220	1 laporan	15.285.200	1 laporan	18.090.430	1 laporan	17.229.000						1 laporan	17.229.000		32.514.200		80,28
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada diKecamatan		9.517.460		2.031.040		7.633.730		441.600		1.890.800				4.218.500		6.550.900		8.581.940	

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)			
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis kegiatan PATEN yang dilaksanakan	12 jenis	9.517.460	12 jenis	2.031.040	12 jenis	7.633.730	12 jenis	441.600	12 jenis	1.890.800	-	12 jenis	4.218.500	12 jenis	6.550.900		8.581.940		90,17		
							100%		100%															
	II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti 2. IKM Kecamatan																					
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi		382.374.320		341.543.760		27.137.160		6.785.000		5.220.000		4.870.000		8.585.500		25.460.500		367.004.260		95,98	
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Trantibum yang Dilaksanakan	20 Kali	382.374.320	20 Kali	341.543.760	20 Kali	27.137.160	5 kali	6.785.000	4 kali	5.220.000	3 kali	4.870.000	8 kali	8.585.500	5 kali	25.460.500		367.004.260		95,98	
VI	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	10 0%	1.396.958.640	100 %	1.369.883.190													1.369.883.190		98,06			

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)			
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok pembinaan dan kegiatan LPM, PKK, RT/ RW		1.244.860.545	6 kel	1.219.282.285												6 kel	1.219.282.2		97,95		
	2	Pembinaan kegiatan kemasyarakatan	Jumlah pokja sehat yang dibina		152.098.095	6 kel	150.600.905												6 kel	150.600.905		99,02		
	VII	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase kehadiran peserta musrembang	100%	232.258.375	100 %	231.265.465													231.265.465		99,57		
	1	Pelaksanaan Musyawarah pembanguna desa	Jumlah terlaksananya musrembang tingkat kecamatan/ kelurahan dan jumlah peserta musrembang yang hadir		232.258.375	7 kali	231.265.465												7 kali	231.265.465		99,57		
	VIII	Program Peningkatan Kualitas pelayanan kehidupan Beragama	Persentase santri yang berkualitas	100%	370.934.485	100 %	367.614.240													367.614.240		99,10		
	1	Peningkatan Kehidupan Beragama	Jumlah santri yang dibina di pondok quran, jumlah khalifah yang dikirim ke MTQ tk. Kota		370.934.485	3 kegiatan	367.614.240												3 kegiatan	367.614.240		99,10		

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)			
									I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	I V	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM Kecamatan (IKM Kelurahan) 2. Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dlam musrenbang kelurahan. 3.Persentase lembaga kemasyarakata n yang aktif		1. 100% 2. 86,00 3. 100%		1. 100% 2. 86,00 3. 100%										1. 100% 2. 86,00 3. 100%		1. 100% 2. 86,00 3. 100%					
		Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan dengan organisasi kemasyarakata n yang dibina		532.161.600	100%	239.657.100	100%	276.227.990		1.440.000		69.293.900		54.528.398		139.438.120		264.700.418		504.357.518		94,78	
		1	Penyelenggara an Lebag a Kemasyaraka tan	Jumlah Kelurahan dengan organisasi kemasyarakata n yang dibina	35 kal i	532.161.600	6 kel	239.657.100	6 kel	276.227.990	6 kel	1.440.000	6 kel	69.293.900	6 kel	54.528.398	6 kel	139.438.120	6 kel	264.700.418		504.357.518		94,78
		2	Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	Persentase Kehadiran peserta musrenbang Kelurahan 2. Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan yang difasilitasi		1.227.353.016		601.888.728	100%	533.519.108		103.282.866		125.899.964		116.987.064		162.062.376		508.232.270		1.110.120.998		90,45

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Musrenbang Kelurahan yang Disusun	30 laporan	79.199.880	6 laporan	38.099.940		38.099.940	6 laporan	25.431.090	6 laporan	3.834.000			6 laporan	7.200.000	6 laporan	36.465.090		74.565.030		94,15
	2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Panjang Dalam	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	160.237.456	1 jenis	78.842.018	1 jenis	67.111.808	1 jenis	10.086.596	1 jenis	16.092.144	1 jenis	16.928.144	1 jenis	21.452.796	1 jenis	64.559.680		143.401.698		89,49
	3	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Koto Panjang Padang	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	160.237.456	1 jenis	76.857.518	1 jenis	67.108.858	1 jenis	9.767.596	1 jenis	14.021.644	1 jenis	15.695.644	1 jenis	24.772.096	1 jenis	64.256.980		141.114.498		88,07
	4	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Parambahan	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	160.237.456	1 jenis	79.413.018	1 jenis	67.111.808	1 jenis	11.193.096	1 jenis	16.099.644	1 jenis	16.181.144	1 jenis	22.254.296	1 jenis	65.728.180		145.141.198		90,58
	5	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Padang Sikabu	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	160.237.456	1 jenis	78.848.518	1 jenis	67.032.098	1 jenis	10.402.096	1 jenis	18.329.644	1 jenis	16.135.644	1 jenis	20.494.296	1 jenis	65.361.680		144.210.198		90,00
	6	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Parik Muko Aia	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	160.237.456	1 jenis	78.941.018	1 jenis	67.111.808	1 jenis	11.162.596	1 jenis	14.450.144	1 jenis	16.337.444	1 jenis	21.467.296	1 jenis	63.417.480		142.358.498		88,84

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)					
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	7	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sungai Durian	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	1 jenis	160.237.456	1 jenis	79.828.018	1 jenis	67.111.808	1 jenis	10.849.596	1 jenis	16.922.644	1 jenis	15.542.144	1 jenis	21.001.296	1 jenis	64.315.680		144.143.698		89,96				
		8	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Koto Panjang Dalam	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	31.121.400	28 kali	15.453.800	28 kali	15.560.590	7 kali	3.580.000	7 kali	3.349.500	10 kali	6.017.000	4 kali	1.265.700	28 kali	14.212.200		29.666.000		95,32			
			9	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Koto Panjang Padang	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	31.121.400	28 kali	14.247.000	28 kali	15.559.550	7 kali	3.699.000	3 kali	1.499.300	4 kali	1.842.500	14 kali	6.639.600	28 kali	13.680.400		27.927.400		89,74		
				10	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Parambahan	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	31.121.400	28 kali	15.298.800	28 kali	15.560.590	3 kali	1.709.000	5 kali	2.978.000	5 kali	2.826.200	15 kali	6.214.500	28 kali	13.727.700		29.026.500		93,27	
					11	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Padang Sikabu	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	31.121.400	28 kali	14.964.620	28 kali	15.029.190	5 kali	2.219.200	12 kali	6.220.500	3 kali	1.550.000	8 kali	3.569.000	28 kali	13.558.700		28.523.320		91,65
						12	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Parik Muko Aia	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	31.121.400	28 kali	15.532.500	28 kali	15.560.470	1 kali	788.000	13 kali	6.566.600	5 kali	2.599.200	9 kali	4.197.000	28 kali	14.150.800		29.683.300	

Sasaran	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome )/ Kegiatan ( Output)	Target Renstra sampai Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Pada Renja s.d Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi ( 2022)		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 ( %)	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	1 2	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Sungai Durian	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	28 kali	31.121.400	28 kali	15.494.700	28 kali	15.560.590	5 kali	2.395.000	9 kali	5.536.200	9 kali	5.332.000	5 kali	1.534.500	28 kali	14.797.700	30.292.400		97,34	
							1.100% 2.85 %		1.100% 2.85 %									1.100% 2.85 %					
	V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang Berkualitas 2. Persentase Santri yang Berkualitas																				
1	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan lingkup Kesos yang difasilitasi		166.181.900		82.312.600	100%	100.840.940		10.810.900		6.576.000		32.795.100		47.466.200		97.648.200		179.960.800		108,29
	1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Pelatihan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan	104 kali	166.181.900	91 kali	82.312.600	104 kali	100.840.940	14 kali	10.810.900	7 kali	6.576.000	46 kali	32.795.100	37 kali	47.466.200		97.648.200		179.960.800		108,29
Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program					23.512.070.103		16.566.589.792		6.154.221.855		1.036.402.870		1.423.112.795		1.472.164.946		1.625.075.562		5.599.512.773		22.166.102.565		94,28
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																				22.166.102.565		94,28	

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lamposi Tigo nagori Kota Payakumbuh Tahun 2022, capaian Rencana Kerja Tahun 2022. Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

## **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dengan indikator nilai IKM, target sebesar 89 terealisasi sebesar 87,75 didukung oleh 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan sebagai berikut :

### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Penyusunan IKM, SOP, SPP ,Renja dan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagari dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.624.690,- terealisasi sebesar Rp. 3.955.100,- atau sebesar 85,52%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD  
Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen laporan (LAKIP, LKPJ, EKPPD dan Laporan bulanan) serta koordinasi yang dilaksanakan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, dengan alokasi anggaran Rp. 1.962.380,- terealisasi sebesar Rp.1.764.900,- atau sebesar 89,94%
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan laporan monev renja dan evaluasi kinerja pada kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.962.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.598.800 atau sebesar 81,47%

### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berjumlah 44 orang dengan capaian kinerja 100%, dari alokasi anggaran Rp. 4.730.411.454 terealisasi sebesar Rp. 4.261.164.178,- atau sebesar 90,08%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD  
Kegiatan ini berupa penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II, Laporan Fungsional, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Dalbang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.962.380,- dan terealisasi

sebesar Rp.1.686.800 atau 85,96%

### **3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Kegiatan ini berupa penyediaan alat listrik dan elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.032.400 terealisasi sebesar Rp.3.684.100,- atau 91,36%
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Sub Kegiatan ini berupa pengadaan mesin fingerprint di Kantor Lurah Koto Panjang Dalam untuk peningkatan disiplin pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.084.230, terealisasi sebesar Rp.6.100.000,- dengan capaian keuangan sebesar 86,11%
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Sub Kegiatan ini berupa pengadaan sound system portable dengan alokasi anggaran Rp.4.500.000, terealisasi sebesar Rp.4.470.000,- dengan capaian keuangan 99,33%
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Kegiatan ini berupa penyediaan kebutuhan logistik kantor seperti belanja makan dan minum rapat, alat kebersihan dan bahan pembersih, ATK kecamatan/ Kantor Camat Latina dan Kelurahan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.579.375 dan terealisasi sebesar Rp. 70.449.315,- atau 93,21%,-
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetak, biaya penggandaan dan penjilidan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.524.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.085.475,- atau 80,52%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar yaitu Padang Ekspres dan Singgalang dengan target sebanyak 2427 Eksemplar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.343.570,- dan terealisasi sebesar Rp.14.340.000,- atau 99,98%
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.663.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.323.485,- atau 86,02%

#### **4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **a. Pengadaan Mebel**

Kegiatan ini berupa Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kursi kerja) dalam mendukung efektifitas kerja dengan target 2 unit dan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau 100%

##### **b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp.2.951.770,- berupa pengadaan printer dengan spesifikasi Epson L360, Pengadaan printer ini tidak dapat terealisasi karena barang dengan spesifikasi yang dimaksud sudah tidak tersedia di pasaran.

##### **c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi perencanaan untuk pembangunan kelurahan Sungai Durian dengan alokasi anggaran Rp.34.299.900,- dengan realisasi sebesar Rp.34.000.000,- atau 99,13%

#### **5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan ini berupa penyediaan benda pos berupa materai dan buku cek yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp.920.000,- atau 100,00%

##### **b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan ini berupa pembayaran tagihan Listrik, air, telepon untuk kebutuhan Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.572.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.064.662,- atau 76,95%

##### **c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Kegiatan ini berupa pembayaran jasa Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 orang pada Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.755.848,- , dan terealisasi sebesar Rp. 49.125.680,- atau 96,79%

#### **6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sub Kegiatan ini berupa biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua dan

roda empat (servis, ganti oli dan penggantian suku cadang), pembayaran bantuan BBM serta pembayaran pajak kendaraan dinas.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.600.000,- , dan terealisasi sebesar Rp. 97.095.285 atau sebesar 91,95%

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC, komputer, printer yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 9.263.250 dan terealisasi sebesar Rp.7.283.600,- atau 78,63%

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini berupa berupa rehab gedung pada Kantor Camat dan Kantor Lurah di Lingkungan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan alokasi anggaran Rp. 32.759.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.580.105,- atau dengan capaian 99,45%

## **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

### **1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**

#### **Kecamatan**

a. Sub Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan pada Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 18.090.430,- terealisasi sebesar Rp.17.229.000,- dengan capaian 95,24%,-

### **2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan PATEN pada Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 7.633.730,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.550.900 ,- dengan capaian kinerja 85,82%

### **III. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**

#### **1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 38.099.940,- terealisasi sebesar Rp. 36.465.090,- dengan capaian kinerja 95,71%

- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto panjang dalam Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Koto Panjang Dalam berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.67.111.808,- terealisasi sebesar Rp.64.559.680,- dengan capaian kinerja 96,20%

- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Dalam berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.15.560.590 dan terealisasi sebesar Rp. 14.212.200,- dengan capaian kinerja 91,33%

- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto panjang Padang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Koto panjang Padang berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan).. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.67.108.858,- terealisasi sebesar Rp.64.256.980,- dengan capaian kinerja 95,75%

- e. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Koto panjang Padang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Koto panjang Padang berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 15.559.550,- dan

teralisasi sebesar Rp. 13.680.400,- dengan capaian kinerja 87,92%

- f. **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu**  
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Padang Sikabu berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 67.032.098,- teralisasi sebesar Rp.65.361.680,- dengan capaian kinerja 97,51%
- g. **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu**  
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Padang Sikabu berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 15.029.190,- dan teralisasi sebesar Rp. 13.558.700,- dengan capaian kinerja 90,22%
- h. **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan**  
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Parambahan berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 67.111.808,- teralisasi sebesar Rp.65.728.180,- dengan capaian 97,94%
- i. **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan**  
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Parambahan berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 15.560.590,- dan teralisasi sebesar Rp.13.727.700,- dengan capaian 88,22%
- j. **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Durian**  
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Sungai Durian berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 67.111.808,- teralisasi sebesar Rp.64.315.680,- dengan capaian 95,83%

k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Durian

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Sungai Durian berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 15.560.590,- dan terealisasi sebesar Rp.14.797.700,- dengan capaian 95,10%

l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Parik Muko Aia berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (seperti pelayanan administrasi dan persampahan). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 67.111.808,- terealisasi sebesar Rp.63.417.480,- atau 94,50%

m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Parik Muko Aia berupa kegiatan mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 15.560.470,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.150.800,- dengan atau 90,94%

## **2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berupa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif seperti : RT/RW, LPM dan PKK tingkat kelurahan dan kecamatan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 276.227.990,- terealisasi sebesar Rp.264.700.418,- atau 95,83%

## **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum serta penanganan covid 19 pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 27.137.160,- terealisasi sebesar Rp.25.460.500,- dengan atau 93,82%,-

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup Kesejahteraan Sosial dan keagamaan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meliputi Pembinaan UKS, Forum Kecamatan Sehat, peningkatan kualitas santri yang di bina di pondok Alqur'an dan kegiatan keagamaan lainnya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.840.940,- dan terealisasi sebesar Rp.97.648.200,- dengan capaian kinerja 96,83%

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan

## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi keuangan oleh kelurahan;
- h. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi

### 3. Lurah

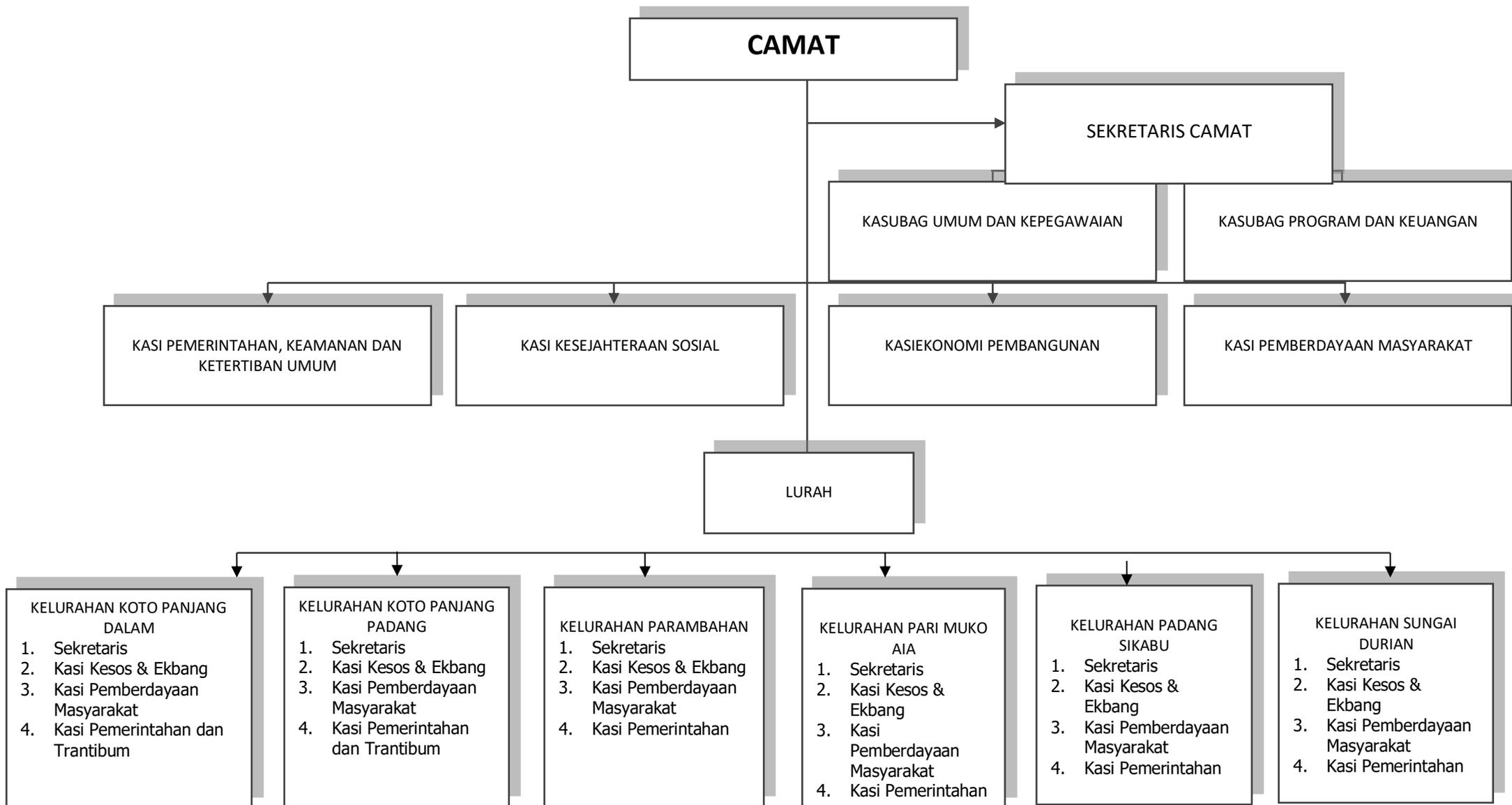
Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- b. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kelurahan;
- c. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan;
- e. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN ORGANISASI KEC. LAMPOSI TIGO NAGORI**



Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lamposi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai di akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Hasil Review yang dilakukan pada Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, mempengaruhi target kinerja yang ingin dicapai.

Review ini membantu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk kembali lagi kepada fungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang bertindak sebagai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Untuk penyelenggaraan pemerintah, prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dinilai dengan menggunakan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), untuk perangkat daerah di Kota Payakumbuh nilai AKIP ini dikeluarkan oleh Inspektorat yang bertindak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Sedangkan untuk menentukan kinerja layanan pemerintah terkait dengan pelayanan publik yang disediakan dinilai secara langsung oleh masyarakat melalui Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pencapaian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Indeks Kepuasan Masyarakat			√		81	84	86	89	84,85	86,26	86,5	87,75	90	90	
	Nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RT RW, PKK) yang aktif		√	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Payakumbuh , Agustus 2023  
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

**DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP**  
NIP. 198504262003121001

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Payakumbuh No 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan  
Dari Rekapitulasi Data Kelembagaan dan Data Kepegawaian Kec. Lamposi Tigo Nagori menunjukkan personil yang tersedia belum memenuhi jumlah personil yang dibutuhkan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada optimalisasi penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat baik itu di tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.  
Tuntutan kinerja dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat kemajuannya dimana semua pekerjaan sudah terintegrasi dengan teknologi berbasis IT, hal ini menuntut kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana pendukung kerja menjadi salah satu faktor kendala dalam peningkatan kapasitas aparatur.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan. Hal tersebut diatas berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya ditandai dengan pelaksanaan musrembang masih rendah, masih ada respon pasif peserta musyawarah atas usulan yang muncul dari peserta lain

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diantaranya:

### **I. Tantangan**

- a. Tingginya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga perlunya pengembangan sistem PATEN yang berbasis IT;
- b. Tuntutan masyarakat untuk adanya pembiayaan kegiatan kemasyarakatan oleh Kecamatan maupun Kelurahan sebagai Wakil Pemerintah Kota;
- c. Kemajuan Teknologi Informasi yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tetapi juga dapat menjadi sarana pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah;
- d. Fungsi media sosial dapat digunakan masyarakat sebagai sarana kritik dan saran yang terkadang belum dikonfirmasi kebenarannya
- e. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan di kecamatan.

### **II. Peluang**

- a. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh dimana adanya pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yg dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna menunjang pelayanan prima.
- b. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017 mengenai Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Payakumbuh, yang memungkinkan setiap masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerah. Perwako ini mengamanatkan proses penyaringan kebutuhan pembangunan daerah dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga);
- c. Meningkatnya alokasi anggaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
- d. Kemudahan akses internet dan media sosial dalam menyebarkan informasi pelayanan terhadap masyarakat maupun program kerja Kecamatan lamposi Tigo nagori

Adapun Isu strategis dalam lingkup lokal yang sering menjadi diskusi dan pembahasan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori antara lain adalah :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara menelaah isu-isu strategis yang ditetapkan serta agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2024. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat daerah adalah Rencana Tahunan (Annual Planning) bersifat Operasional yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD dan memuat rancangan kerangka pembangunan OPD, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat lebih rinci lengkap dengan ruang lingkup dan spesifikasinya, dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD sehingga perlu dilakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk tahun 2024.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dan secara review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024  
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Latina	Nilai IKM Nilai evaluasi AKIP Latina oleh Inspektorat	90 A	7.202.651.499	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Latina	Nilai IKM Nilai evaluasi AKIP Latina oleh Inspektorat	90 A	5.586.042.342	
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		1. Persentase capaian kinerja program / kegiatan 2. Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100% 95%	87.761.650	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		1. Persentase capaian kinerja program / kegiatan 2. Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100% 95%	59.114.945	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	32.836.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	16.334.600	
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Latina	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	54.924.700	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Latina	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	42.780.345	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>	<b>90%</b>	<b>4.861.728.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>	<b>90%</b>	<b>4.857.524.481</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Latina	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org/bulan	4.610.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Latina	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org/bulan	4.603.205.781	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Latina	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	251.728.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Latina	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	254.318.700	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Latina	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>52.385.290</b>						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Latina	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	<b>45 paket</b>	52.385.290						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Latina</b>	<b>Persentase layanan umum kecamatan Latina yang sesuai standar</b>	<b>80%</b>	<b>234.647.660</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Latina</b>	<b>Persentase layanan umum kecamatan Latina yang sesuai standar</b>	<b>80%</b>	<b>153.252.150</b>	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Latina	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	5 paket	8.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5.686.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Latina	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 PAKET	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Latina	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 PAKET	60.047.125	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Latina	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 PAKET	12.543.900	Penyediaan barang cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 PAKET	11.760.475	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Latina	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	18.263.760	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Latina	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.464.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Latina	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	840.000						
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Latina	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	70.293.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Latina</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>85%</b>	<b>115.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Latina</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>85%</b>	<b>115.000</b>	
	"Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Latina	"Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	8 UNIT	256.000.000						
	Kendaraan Dinas Jabatan"	Latina	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan"	6 PAKET	97.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Latina	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	50.000.000						
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Latina	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1 unit	825.528.899						
4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	80.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	115.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Latina	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah</b>	<b>85%</b>	<b>390.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Latina	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah</b>	<b>85%</b>	<b>387.755.766</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Latina	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	30.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Latina	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	4 laporan	28.903.230	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Latina	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	360.000.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Latina	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	358.852.536	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Latina	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	128.280.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Latina	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	128.280.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Latina	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	112.550.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Latina	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	112.550.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	4.000.000						
5	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 unit	15.730.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 unit	15.730.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	7 unit	50.000.000						
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Latina	1. Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu 2. Persentase usulan Musrenbang Kec. Latina yang diterima perangkat daerah	1. 85% 2. 70%	28.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Latina	1. Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu 2. Persentase usulan Musrenbang Kec. Latina yang diterima perangkat daerah	1. 85% 2. 70%	21.508.645	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan</b>	<b>70%</b>	<b>22.000.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan</b>	<b>70%</b>	<b>17.936.975</b>	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Latina	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	22.000.000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Latina	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	17.936.975	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>3.571.670</b>	
6	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	<b>6.000.000</b>	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	3.571.670	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Latina	<b>1. IKM Kelurahan 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>90 100%</b>	<b>1.344.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Latina	<b>1. IKM Kelurahan 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>90 100%</b>	<b>1.276.138.010</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Latina	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	42.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Latina	1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	1.237.844.360	
7	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	42.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 lembaga kemasyarakatan	39.845.350	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Dalam		1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	200.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Dalam		1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif	1.85% 2.100%	199.999.950	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Koto Panjang dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		50.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Koto Panjang dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		53.462.500	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Koto Panjang dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	150.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Koto Panjang dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	146.537.450	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.745</b>	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Koto Panjang Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		50.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Koto Panjang Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		36.101.440	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Koto Panjang Padang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	150.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Koto Panjang Padang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	163.898.305	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.925</b>	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Padang Sikabu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		60.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Padang Sikabu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		44.585.300	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Padang Sikabu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	140.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Padang Sikabu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	155.414.625	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pambahan</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pambahan</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.680</b>	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Pambahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		50.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Pambahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		126.843.120	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Pambahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	150.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Pambahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	73.156.560	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Durian</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Durian</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>197.999.760</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Sungai Durian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		50.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Sungai Durian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		71.850.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Sungai Durian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	150.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Sungai Durian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	126.149.760	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.950</b>	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Parik Muko Aia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Parik Muko Aia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		39.462.070	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Parik Muko Aia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	160.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Parik Muko Aia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Organisasi Masyarakat	160.537.880	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Latina</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>102.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Latina</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>38.293.650</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Latina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga kemasyarakatan	102.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Latina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga kemasyarakatan	38.293.650	
III	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>28.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>27.137.160</b>	
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Kegiatan lingkup trantip yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	28.000.000	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Kegiatan lingkup trantip yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>10.928.685</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Latina	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	28.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Latina	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	10.928.685	
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>116.242.100</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>38.810.675</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>	116.242.100	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Yang Terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>38.810.675</b>	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi	Latina	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	93.000.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi	Latina	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	35.560.875	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Latina	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	23.242.100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Latina	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3.249.800	

Payakumbuh , Agustus 2023  
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

**DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP**  
NIP. 198504262003121001

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan yang dimulai dari tingkat RT, yang secara bertingkat kemudian akan menentukan prioritas pada level berikutnya, sehingga dari jumlah usulan yang masuk pada saat mufakat RW, dilanjutkan melalui Rembuk Kelurahan (Musyawarah Kelurahan). Dari usulan yang dikirimkan tersebut, proses seleksi usulan dimaksud dilakukan melalui e-Musrenbang dan melalui e-Pokir.

Persandingan hasil musrenbang pada tahun 2023 dengan Rencana Kerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan usulan program dari pemangku kepentingan ditabulasikan pada Tabel 2.5

Tabel 2.4  
 PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT  
 DAERAH TAHUN 2024  
 KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023				Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan/ subkeg Rancangan Renja Tahun 2024	Pagu Indikatif Tahun 2024	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>NIHIL</b>					

Payakumbuh , Agustus 2023  
 CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

**DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP**  
 NIP. 198504262003121001

Tabel 2.5  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024  
 KOTA PAYAKUMBUH**

**KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan / Subkegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Lamposi Tigo Nagori (Kel. Koto Panjang Dalam)	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Usulan Pokir ( belum terakomodir pada renja 2024)
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	seluruh Kelurahan pada Kec. Lamposi Tigo Nagori	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 paket	Usulan Pokir (Belum terakomodir untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan lamposi tigo nagori)

Payakumbuh , Agustus 2023  
 CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI

**DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP**  
 NIP. 198504262003121001

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan Provinsi diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2024**

<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh</b>	<b>Program/ Kegiatan dalam Renja 2024</b>
Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	1. Program penunjang urusan pemerintah
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan lamposi Tigo Nagori tahun 2023 - 2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah **“Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”**

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik.
2. Meningkatkan peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan

Sebagai gambaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	87,75	90	90	90	90
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, targer capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi program dan kegiatan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi pembangunan daerah Kota Payakumbuh.

a) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga ada pertimbangan lain seperti :

- Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang mendukung tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026
- Dalam rangka pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang fokus kepada indikator pembangunan di daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan

b) Pencapaian Tujuan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam hal Penanggulangan Kemiskinan didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

c) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori didukung oleh 5 program, 13 kegiatan, dan 33 sub kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Nilai IKM Nilai evaluasi AKIP Latina oleh Inspektorat	Latina	90 A	<b>5.586.042.342</b>	DAU		90 A	<b>5.960.171.860</b>
I.1	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>1. Persentase capaian kinerja program / kegiatan 2. Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja</b>		<b>100% 95%</b>	<b>59.114.945</b>	DAU		<b>100% 95%</b>	<b>96.537.815</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Latina	4 dokumen	16.334.600	DAU		4 dokumen	36.120.645
2	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Latina	2 laporan	42.780.345	DAU		2 laporan	60.417.170
I.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</b>		<b>90%</b>	<b>4.857.524.481</b>	DAU		<b>90%</b>	<b>4.864.933.781</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Latina	45 org/bulan	4.603.205.781	DAU		45 org/bulan	4.603.205.781
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Latina	12 dokumen	254.318.700	DAU		12 dokumen	261.728.000
I.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum kecamatan Latina yang sesuai standar</b>	<b>Latina</b>	<b>80%</b>	<b>153.252.150</b>	DAU		<b>80%</b>	<b>274.740.264</b>

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Latina	5 paket	5.686.750	DAU		5 paket	9.800.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Latina	5 PAKET	60.047.125	DAU		5 PAKET	66.051.838
3	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Latina	3 PAKET	11.760.475	DAU		3 PAKET	13.798.290
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Latina	1 Dokumen	5.464.800	DAU		1 Dokumen	20.090.136
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Latina	2 laporan	70.293.000	DAU		2 laporan	165.000.000
<b>I.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>Latina</b>	<b>85%</b>	<b>115.000</b>	<b>DAU</b>		<b>85%</b>	<b>60.000.000</b>
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Latina	1 unit	115.000	DAU		1 unit	60.000.000
<b>I.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah</b>	<b>Latina</b>	<b>85%</b>	<b>387.755.766</b>	<b>DAU</b>		<b>85%</b>	<b>429.000.000</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Latina	4 laporan	28.903.230	DAU		4 laporan	33.000.000

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Latina	2 laporan	358.852.536	DAU		2 laporan	396.000.000
I.6	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</b>	Latina	85%	128.280.000	DAU		85%	234.960.000
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Latina	30 unit	112.550.000	DAU		30 unit	201.960.000
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		23 unit	15.730.000	DAU		23 unit	33.000.000
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu 2. Persentase usulan Musrenbang Kec. Latina yang diterima perangkat daerah</b>	Latina	1. 85% 2. 70%	21.508.645	DAU		1. 85% 2. 70%	30.800.000
II.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan</b>		70%	17.936.975	DAU		70%	24.200.000
1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Latina	1 laporan	17.936.975	DAU		1 laporan	24.200.000
II.2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik</b>		100%	3.571.670	DAU		100%	6.600.000

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan	3.571.670	DAU		12 laporan	6.600.000
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. IKM Kelurahan 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	Latina	<b>90 100%</b>	<b>1.276.138.010</b>	DAU		<b>90 100%</b>	<b>1.488.400.000</b>
III.1	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	Latina	<b>1.85% 2.100%</b>	<b>1.237.844.360</b>	DAU		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>1.376.200.000</b>
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3 lembaga kemasyarakatan	39.845.350	DAU		3 lembaga kemasyarakatan	46.200.000
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Dalam</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.950</b>	DAU diarahkan		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>220.000.000</b>
2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Koto Panjang dalam		53.462.500	DAU diarahkan			55.000.000
3	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Koto Panjang dalam	3 Organisasi Masyarakat	146.537.450	DAU diarahkan		3 Organisasi Masyarakat	165.000.000

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.745</b>	<b>DAU diarahkan</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>220.000.000</b>
4	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Koto Panjang Padang		36.101.440	DAU diarahkan			55.000.000
5	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Koto Panjang Padang	3 Organisasi Masyarakat	163.898.305	DAU diarahkan		3 Organisasi Masyarakat	165.000.000
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.925</b>	<b>DAU diarahkan</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>230.000.000</b>
6	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Padang Sikabu		44.585.300	DAU diarahkan			65.000.000
7	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padang Sikabu	3 Organisasi Masyarakat	155.414.625	DAU diarahkan		3 Organisasi Masyarakat	165.000.000
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pambahan</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.680</b>	<b>DAU diarahkan</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>220.000.000</b>
8	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Pambahan		126.843.120	DAU diarahkan			55.000.000

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Parambahan	3 Organisasi Masyarakat	73.156.560	DAU diarahkan		3 Organisasi Masyarakat	165.000.000
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Durian</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>197.999.760</b>	<b>DAU diarahkan</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>220.000.000</b>
10	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Sungai Durian		71850000	DAU diarahkan			55000000
11	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sungai Durian	3 Organisasi Masyarakat	126.149.760	DAU diarahkan		3 Organisasi Masyarakat	165.000.000
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>199.999.950</b>	<b>DAU diarahkan</b>		<b>1.85% 2.100%</b>	<b>220.000.000</b>
12	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Parik Muko Aia		39.462.070	DAU diarahkan			55.000.000
13	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Parik Muko Aia	3 Organisasi Masyarakat	160.537.880	DAU diarahkan		3 Organisasi Masyarakat	165.000.000
III.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>Latina</b>	<b>100%</b>	<b>38.293.650</b>			<b>100%</b>	<b>112.200.000</b>

No	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Latina	3 lembaga kemasyarakatan	38.293.650	DAU		3 lembaga kemasyarakatan	112.200.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>	<b>27.137.160</b>			<b>100%</b>	<b>27.137.160</b>
IV.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kegiatan lingkup trantip yang difasilitasi</b>		<b>100%</b>	<b>10.928.685</b>			<b>100%</b>	<b>30.800.000</b>
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Latina	12 laporan	10.928.685	DAU		12 laporan	30.800.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi</b>		<b>100%</b>	<b>38.810.675</b>			<b>100%</b>	<b>230.166.310</b>
V.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Yang Terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>38.810.675</b>			<b>100%</b>	<b>230.166.310</b>
1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Latina	3 Dokumen	35.560.875	DAU		3 Dokumen	127.866.310
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Latina	3 Dokumen	3.249.800	DAU		3 Dokumen	21.300.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LAMPOSI TIGONAGORI**

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Tahun 2024 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori didukung oleh 5 program , 12 kegiatan dengan 37 sub kegiatan seperti di gambarkan pada table 4.1

**Tabel IV.I**  
**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**7.01.0.00.0.00.05.00 -KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGARI**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI</b>						<b>5.735.429.347</b>								<b>6.291.486.332</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>5.723.668.872</b>							<b>6.277.688.042</b>		
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>5.723.668.872</b>							<b>6.277.688.042</b>		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	<i>Nilai IKM Kecamatan Tigo Nagori Nilai AKIP Kecamatan Tigo Nagori</i>	-			90 Indeks A Kategori	5.574.281.867						-	5.929.821.732		
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian kinerja program / kegiatan</i>	-			100 %	59.114.945			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	96.537.815	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI	
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	16.334.600,00	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		20.645,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				7 Laporan	42.780.345,00	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		17.170,00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</i>	-			90 %	4.857.524.481,0 0			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Asn Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	-	4.864.933.781, 00	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	4.603.205.781,0 0	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Asn Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		.205.781, 00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	254.318.700,00	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Asn Kecamatan Lamposi Tigo Nagori		261.728.000,0 0	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar</i>	-			80 %	141.491.675,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	244.390.136,0 0	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5.686.750,00	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		00.000,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	60.047.125,00	- Kota Payakum buh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		0.000,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	5.464.800,00	- Kota Payakum buh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		0.136,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	70.293.000,00	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		100.000,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</i>	-			85 %	115.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	60.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	115.000,00	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		60.000.000,00	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah</i>	-			85 %	387.755.766			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	429.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	28.903.230	- Kota Payakum buh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		3.000.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	358.852.536	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		396.000.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>	-			85 %	128.280.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	234.960.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				24 Unit	112.550.000	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		1.960.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.01.2.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	9.0006															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	15.730.000	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kecamatan LamposiTigo Nagori		33.000.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang diterima Perangkat Daerah</i>	-			85,00 % 70,00 %	21.508.645						-	30.800.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan</i>	-			70 %	17.936.975			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	24.200.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	17.936.975	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori		24.200.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik</i>	-			100 %	3.571.670			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	6.600.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	3.571.670	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori		6.600.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarak atan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>	-			90,00 indeks 100 %	78.139.000						-	158.400.000	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	39.845.350			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	46.200.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				3 Lembaga Kemasyara katan	39.845.350	- Kota Payakum buh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori		46.200.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi</i>	-			100 %	38.293.650			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyeleng araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	112.200.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Diseleng garkan</i>				2 Lembaga K emasyar akatan	38.293.650	- Kota Payakum buh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan Lamposi Nagori		112.200.000	KECAM ATAN LAMPO SITIGO NAGORI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>"Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanj uti kece latina</i>	-			100 %	10.928.685						-	30.800.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi</i>	-			100 %	10.928.685			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	30.800.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.04.2.0 1.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				10 Laporan	10.928.685	- Kota Payakumbuh , Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaran pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori		30.800.000	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
5	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<i>Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. latina</i>	-			100 %	38.810.675						-	127.866.310	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana</i>	-			100 %	38.810.675			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori	-	127.866.310	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.05.2.0 1.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				3 Dokumen	35.560.875	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori		2.300.000	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan</i>				3 Dokumen	3.249.800	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kecamatan LamposiTigo Nagori		5.566.310	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	-	-						11.760.475							13.798.290	
6	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Nilai IKM Kecamatan Lamposi Tigo Nagori</i>	-			A Kategori 90 Indeks	11.760.475						-	13.798.290	
	7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar</i>	-			80 %	11.760.475			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	-	-	13.798.290	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	11.760.475	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	-		3.798.290	KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI
		<b>KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM</b>						<b>199.999.950</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>199.999.950</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>199.999.950</b>							<b>220.000.000</b>	
1	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b><i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarak atan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i></b>	-			<b>90,00 indeks 100 %</b>	<b>199.999.950</b>						-	<b>220.000.000</b>	
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	199.999.950			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyara kat Keluraha n Koto Panjang Dalam	-	220.000.000	KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	53.462.500	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam		5.000.000	KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas /Ormas	146.537.450	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam		5.000.000	KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM
		<b>KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG</b>						<b>199.999.745</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>199.999.745</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>199.999.745</b>							<b>220.000.000</b>	
1	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>	-			<b>90,00 indeks 100 %</b>	<b>199.999.745</b>						-	<b>220.000.000</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	199.999.745			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Padang	-	220.000.000	KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	36.101.440	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Padang		5.000.000	KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan</i>				3 Pokmas /Ormas	163.898.305	Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Padang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Koto Panjang Padang		5.000.000	KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG
		<b>KELURAHAN PADANG SIKABU</b>						<b>199.999.925</b>							<b>230.000.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>199.999.925</b>							<b>230.000.000</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>199.999.925</b>							<b>230.000.000</b>	
1	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</b>	-			<b>90,00 indeks 100 %</b>	<b>199.999.925</b>						-	<b>230.000.000</b>	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	199.999.925			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Padang Sikabu	-	230.000.000	KELURAHAN PADANG SIKABU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	44.585.300	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Padang Sikabu		5.000.000	KELURAHAN PADANG SIKABU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	155.414.625	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Padang Sikabu		5.000.000	KELURAHAN PADANG SIKABU
		<b>KELURAHAN PARAMBAHAN</b>						<b>199.999.680</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>199.999.680</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>199.999.680</b>							<b>220.000.000</b>	
1	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>	-			<b>90,00 indeks 100 %</b>	<b>199.999.680</b>						-	<b>220.000.000</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	199.999.680			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parambahan	-	220.000.000	KELURAHAN PARAMBAHAN
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	126.843.120	- Kota Payakumbuh ,Lamposi TigoNagori, Parambahan	DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN BAGI KELUR AHAN	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parambahan		5.000.000	KELURAHAN PARAMBAHAN
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	73.156.560	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parambahan		5.000.000	KELURAHAN PARAMBAHAN	
		<b>KELURAHAN SUNGAI DURIAN</b>						<b>199.999.760</b>							<b>220.000.000</b>		
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>199.999.760</b>							<b>220.000.000</b>		
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>199.999.760</b>							<b>220.000.000</b>		
1	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>	-			<b>90,00 indeks 100 %</b>	<b>199.999.760</b>						-	<b>220.000.000</b>		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	199.999.760			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Sungaidurian	-	220.000.000	KELURAHAN SUNGAI DURIAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	71.850.000	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Sungaidurian		5.000.000	KELURAHAN SUNGAI DURIAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	128.149.760	- Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, SungaiDurian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Sungaidurian		5.000.000	KELURAHAN SUNGAI DURIAN
		<b>KELURAHAN PARIK MUKO AIA</b>						<b>199.999.950</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						<b>199.999.950</b>							<b>220.000.000</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>						<b>199.999.950</b>							<b>220.000.000</b>	
1	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>	-			<b>90,00 indeks 100 %</b>	<b>199.999.950</b>						-	<b>220.000.000</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>	-			85 %	199.999.950			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan Parik Muko Aia	-	220.000.000	KELURAHAN PARIK MUKO AIA
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				4 Unit	39.462.070	- Kota Payakumbuh ,Lamposi TigoNagori, Parit Muko Aie	DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN BAGI KELUR AHAN	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan ParikMuko Aia		1.000.000	KELURAHAN PARIK MUKO AIA
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISAAASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET v2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormasyang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan</i>				3 Pokmas /Ormas	160.537.880	- Kota Payakumbuh ,Lamposi TigoNagori, Parit Muko Aie	DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN BAGI KELUR AHAN	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	Peningkata n kualitas tata kelola penyeleng garaan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	masyarakat Kelurahan ParikMuko Aia		176.000.000	KELURAHAN PARIK MUKO AIA
<b>J U M L A H</b>								<b>6.935.428.357</b>							<b>7.621.486.332</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek berdurasi satu tahun. Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi. Sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan, dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya namun juga harus memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran. Agar Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Kecamatan Lamposi Tigo Nagori diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, maka rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah dengan dilakukannya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing seksi/bagian. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Camat Lamposi Tigo Nagori dihadapkan pada hal-hal di luar kendali, maka Konsep Strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali. Saran dan kritik yang membangun selalu kami harapkan demi perbaikan kedepannya

Payakumbuh, Agustus 2023  
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



**DIKI ENGLA MARDIANTO, S.STP**

NIP. 198504262003121001

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SESUAI SUMBER PENDANAAN**

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SEBELUM PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) (sebelum Pemutahiran)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SETELAH PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) setelah pemutahiran	SUMBER PENDANAAN (Rp)											Ket
					DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN					BLUD	INSENTIF FISKAL		
								Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	bid Kewilayahan	P3K				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.586.042.342	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.586.042.342	5.586.042.342	-								-	-	
7 01 01 2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	59.114.945	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	59.114.945	59.114.945	-								-	-	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.334.600	16.334.600											
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	42.780.345	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	42.780.345	42.780.345											
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.857.524.481	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.857.524.481	4.857.524.481											
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.603.205.781	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.603.205.781	4.603.205.781											
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	254.318.700	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	254.318.700	254.318.700											
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.252.150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.252.150	153.252.150											
7 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.686.750	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.686.750	5.686.750											
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.047.125	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.047.125	60.047.125											
7 01 01 2.06 05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	11.760.475	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	11.760.475	11.760.475											
7 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5.464.800	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	5.464.800	5.464.800											
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.293.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.293.000	70.293.000											

KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SEBELUM PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) (sebelum Pemutahiran)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SETELAH PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) setelah pemutahiran	SUMBER PENDANAAN (Rp)								Ket		
									DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN						BLUD	INSENTIF FISKAL
												Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	bid Kewilayahan	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.000	115.000										
7	01	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.000	115.000										
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	387.755.766	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	387.755.766	387.755.766										
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	28.903.230	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	28.903.230	28.903.230										
7	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	358.852.536	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	358.852.536	358.852.536										
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	128.280.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	128.280.000	128.280.000										
7	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	112.550.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	112.550.000	112.550.000										
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.730.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.730.000	15.730.000										
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>21.508.645</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>21.508.645</b>	<b>21.508.645</b>										
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.936.975	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.936.975	17.936.975										
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	17.936.975	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	17.936.975	17.936.975										
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.571.670	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanaka oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.571.670	3.571.670										

KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SEBELUM PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) (sebelum Pemutahiran)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SETELAH PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) setelah pemutahiran	SUMBER PENDANAAN (Rp)								Ket		
									DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN						BLUD	INSENTIF FISKAL
												Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	bid Kewilayahan	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.670	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.571.670	3.571.670										
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.278.138.010</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.278.138.010</b>	<b>78.139.000</b>				<b>1.199.999.010</b>						
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.239.844.360</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.239.844.360</b>	<b>39.845.350</b>				<b>1.199.999.010</b>						
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	39.845.350	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	39.845.350	39.845.350										
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto panjang Dalam</b>	<b>199.999.950</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto panjang Dalam</b>	<b>199.999.950</b>					<b>199.999.950</b>						
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	53.462.500	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	53.462.500					53.462.500						
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	146.537.450	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	146.537.450					146.537.450						
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang</b>	<b>199.999.745</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Koto Panjang Padang</b>	<b>199.999.745</b>					<b>199.999.745</b>						
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	36.101.440	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	36.101.440					36.101.440						
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	163.898.305	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	163.898.305					163.898.305						
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu</b>	<b>199.999.925</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padang Sikabu</b>	<b>199.999.925</b>					<b>199.999.925</b>						
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	44.585.300	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	44.585.300					44.585.300						
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	155.414.625	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	155.414.625					155.414.625						
7	01	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parambahan</b>	<b>199.999.680</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parambahan</b>	<b>199.999.680</b>					<b>199.999.680</b>						
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	126.843.120	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	126.843.120					126.843.120						

KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SEBELUM PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) (sebelum Pemutahiran)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SETELAH PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) setelah pemutahiran	SUMBER PENDANAAN (Rp)								Ket		
									DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN						BLUD	INSENTIF FISKAL
												Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	bid Kewilayahan	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	73.156.560	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	73.156.560							73.156.560				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai durian	199.999.760	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai durian	199.999.760							199.999.760				
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	71.850.000	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	71.850.000							71.850.000				
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	128.149.760	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	128.149.760							128.149.760				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia	199.999.950	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Parik Muko Aia	199.999.950							199.999.950				
7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	39.462.070	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	39.462.070							39.462.070				
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	160.537.880	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	160.537.880							160.537.880				
7	01	03	2.03	I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.293.650	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.293.650	38.293.650										
7	01	03	2.02	00 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	38.293.650	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	38.293.650	38.293.650										
7	01	04		IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.928.685	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.928.685	10.928.685										
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.928.685	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.928.685	10.928.685										
7	01	04	2.01	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	10.928.685	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	10.928.685	10.928.685										
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.810.675	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.810.675	38.810.675										

KODE REKENING					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SEBELUM PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) (sebelum Pemutahiran)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG SETELAH PEMUTAHIRAN	PAGU (Rp.) setelah pemutahiran	SUMBER PENDANAAN (Rp)								Ket		
									DAU BEBAS	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU DIARAHKAN						BLUD	INSENTIF FISKAL
												Bid Pendidikan	Bid Kesehatan	Bidang PUPR	bid Kewilayahan	P3K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.810.675	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.810.675	38.810.675										
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	35.560.875	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	35.560.875	35.560.875										
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.800	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.249.800	3.249.800										
<b>JUMLAH</b>						<b>6.935.428.357</b>		<b>6.935.428.357</b>	<b>5.735.429.347</b>				<b>1.199.999.010</b>						

**DRAFT RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TA 2024  
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI**

<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>CATATAN</b>	<b>alternatif isi belanja</b>
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melakukan rangkaian aktivitas dalam memenuhi tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yakni tahapan persiapan (termasuk penyusunan SK Tim, Pelaksanaan Orientasi), tahapan rancangan, tahapan Forum Perangkat Daerah, tahapan rancangan akhir dan penetapan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja penggandaan - Belanja makan minum rapat - Belanja lembur
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat	rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan perangkat daerah termasuk pelaksanaan rapat-rapat internal Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan		- Belanja ATK - Belanja kertas dan cover - Belanja cetak - Belanja makan minum rapat
<b>7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN serta jaminan pemeliharaan kesehatan ASN dan calon ASN, serta insentif retribusi dan pajak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang		Belanja gaji dan tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN untuk pembayaran honor pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan honor UKPBJ, honor pengelola keuangan, PPK,PPTK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen		honor PPTK, PPK, KPA, PA, Pejabat pengadaan, Bendahara, BPP, Pengurus barang,

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja
<b>7.01.01.2.02.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
7.01.01.2.02.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian pakaian dinas beserta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang bisa diadakan adalah PDH warna khaki, PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah).	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	paket		
<b>7.01.01.2.02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
7.01.01.2.02.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Digunakan untuk pembelian komponen listrik/penerangan kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 1)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik
7.01.01.2.02.06.04 Penyediaan Bahan Logistik	Digunakan untuk pembelian bahan logistik kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 4), ex ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket		Belanja Bahan Kimia, ATK, Kertas, Bahan komputer, alat/ bahan kebersihan kantor
7.01.01.2.02.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Digunakan untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (fotokopi umum, cetak spanduk, cetak buku di umum)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket		Belanja foto copi dan bahan cetak
7.01.01.2.02.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Digunakan untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (koran, ajalah dll)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen		Belanja alat bahan kegiatan kantor lainnya
7.01.01.2.02.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kegiatan menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan dan inisiatif untuk mengkonsultasikan bidang pekerjaan SKPD ke pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	laporan		Belanja perjalanan dinas dalam negeri
<b>7.01.01.2.02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja
7.01.01.2.02.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		Belanja modal
7.01.01.2.02.07.05 Pengadaan mebel	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah	Jumlah unit mobilier yang diadakan	unit		Belanja modal
7.01.01.2.02.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		Belanja modal
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk pembangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		Belanja modal
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya (bangunan pelengkap gedung)	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)	Unit dll		Belanja modal
<b>7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan pembayaran kewajiban setiap bulan untuk biaya telekomunikasi, PDAM dan PLN	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang disediakan	laporan		Belanja Jasa Kantor (tagihan telepon, listrik dan air)
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pihak ketiga atas pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilakukannya	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		Belanja jasa pemeliharaan perlatan kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor yang diberikan seperti resepsionis, supir, tenaga administrasi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		Belanja Jasa Kantor (Honorarium TJP)
<b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan lapangan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (lihat lampiran 10)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		Belanja pemeliharaan peralatan kerja (mesin potong rumput)
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	unit		Belanja pemeliharaan gedung kantor
<b>7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu Persentase usulan Musrenbang Kec. Latina yang diterima perangkat daerah</b>	Persentase		
<b>7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan</b>	Persentase		
7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rangkaian kegiatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan musrenbang TK Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan		B. Dekorasi, B. ATK, B.Spanduk, fotokopi, jilid, makan minum rapat, B Publikasi, B. Penggantian transportasi
<b>7 01 02 2.02 02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>					
7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rangkaian kegiatan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan		B.alat tulis kantor, fotokopi, B.Spanduk/banner, B. Bahan Komputer, B. makan minum rapat, B. Cetak brosur/leaflet
<b>7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>1. IKM Kelurahan 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>			
<b>7 01 03 2.03 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		<b>Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas Kecamatan</b>			
7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan untuk memfasilitasi pembinaan terhadap LPM Kecamatan, PKK Kecamatan dan berbagai rangkaian lomba baik TK Kecamatan maupun TK Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	ormas/ pokmas		B. Alat Tulis Kantor, Honor Narasumber, B. Jasa Juri, B. Cetak spanduk, B. Fotokopi&jilid, B. Makan minum rapat, B. Sewa peralatan & mesin, B. Perjalanan Dinas, B. Pergantian Transport, B. Uang/Jasa yg diberikan kepada masyarakat (Hadiah)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja
<b>7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik 2. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>			
7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rangkaian kegiatan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan musrenbang TK Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	ormas/ pokmas		B. Dekorasi, B. ATK, B.Spanduk, fotokopi, jilid, makan minum rapat, B Publikasi, B. Penggantian transportasi, honor narasumber (honor faskel)
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi : a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		Belanja peralatan kerja, B. Sarana prasarana pendukung keg.masyarakat, Belanja sarana prasarana publik
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan ini digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri meliputi : a..pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas/pokmas		B. Atk, fotokopi, jilid, makan minum, B. Benda pos, bahan komputer, belanja bahan lainnya pendukung keg.masyarakat, cetak spanduk, hnor narasumber, B.Perjalanan dinas dalam kota (Pengganti uang Transport)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja
	g. Peningkatan kualitas lingkungan				
<b>7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>persentase</b>		
<b>7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi</b>	<b>persentase</b>		
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kelurahan	Rangkaian kegiatan dalam koordinasi monitoring, evaluasi ketertiban dan keamanan lingkup kecamatan antara pemerintah, masyarakat, TNI dan Polri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan		B. ATK, fotokopi, jilid, Makan minum rapat, B. Honor Narasumber, B.Perjalanan dinas dalam kota (Pengganti uang Transport)
<b>7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>persentase</b>		
<b>7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Persentase Pembinaan Dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Kemasyarakatan Yang Terlaksana</b>	<b>persentase</b>		
7 01 05 2.01 07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rangkaian Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, Forum Kota Sehat, Pokja Kelurahan Sehat dan kegiatan sosial lainnya serta peningkatan kualitas santri yang di bina di pondok Alqur'an dan kegiatan keagamaan lainnya.	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	dokumen		Belanja ATK, fotokopi, jilid, Bahan Komputer, cetak spanduk, makan minum rapat, B. Honor Narasumber, B.Perjalanan dinas dalam kota (Pengganti uang Transport)
7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rangkaian Kegiatan koordinasi antara pimpinan kecamatan dan stakeholder terkait	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen		Belanja ATK, fotokopi, cetak spanduk, makan minum rapat, B. Honorarium Tim, B.Perjalanan dinas dalam kota (Pengganti uang Transport),

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<b>Program :</b>								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unsur Masyarakat yang Terlibat: Masyarakat (RT/ RW/ Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)</li> <li>Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.</li> <li>Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kelurahan Tahun 2023 adalah 35% dan Laki-laki 65%</li> <li>Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 adalah 31,7% dan Laki-laki 68,3%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN 3 Nagari Lampasi diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki</li> <li>Aspek Kontrol/ Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat RW dan tingkat Kelurahan.</li> <li>Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.</li> <li>Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait</li> </ul>	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; 2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; 2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender	<b>input :</b> Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat RW, Murenbang Tk Kelurahan dan Kecamatan)	<b>input :</b> Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat RW, Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<p>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender</p>		dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.					<p><b>output:</b> Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan</p> <p><b>outcomes:</b> Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan</p>	<p><b>output:</b> Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan</p> <p><b>outcomes:</b> . Terakomodirnya perencanaan Tk. Kelurahan dan Kecamatan</p>
<b>Program :</b>								

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mempunyai 6 Kelurahan. Setiap Kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Wanita	LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki sehingga menimbulkan kesenjangan. PKK dalam Pengurusannya 100% didominasi oleh Perempuan. RT/RW ketuanya didominasi oleh Laki-laki sehingga juga menimbulkan kesenjangan	1)LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan. 2)PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan. 3) RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan	1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan; 2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3 Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan. 4 Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan sehingga pengusulan kepengurusan di dominasi perempuan	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki2 dan perempuan yang proporsional	1. Dalam Penetapan SK Kepengurusan LPM, PKK, RT/RW memperhatikan Persentase Keikutsertaan Laki Laki dan perempuan yang seimbang 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala 3. Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK LPM ataupun RT /RW	<b>input :</b> Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	<b>input :</b> Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang responsif Gender

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
<b>Kegiatan:</b> Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan <b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat							<b>output:</b> Terlaksananya kegiatan dan pembinaan lembaga masyarakat yang ada di kecamatan lamposi tigo nagori	<b>output:</b> Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat yang responsif gender
<b>Tujuan :</b> Meningkatnya peran dan fungsi lembaga masyarakat							<b>outcomes:</b> Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat	<b>outcomes:</b> Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

TAHUN : 2024

ANGGARAN

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN	: Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN	: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
KODE KEGIATAN	: 7.01.02.2.01.01
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unsur Masyarakat yang Terlibat: Masyarakat (RT/ RW/ Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)</li> <li>▪ Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.</li> <li>▪ Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kelurahan Tahun 2023 adalah 35% dan Laki-laki 65%</li> <li>▪ Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 adalah 31,7% dan Laki-laki 68,3%</li> </ul> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspek Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN 3 Nagari Lampasi diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki</li> <li>▪ Aspek Kontrol/ Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat RW dan tingkat Kelurahan.</li> <li>▪ Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.</li> <li>▪ Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.</li> </ul>

	<p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;</li> <li>▪ SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;</li> <li>▪ Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</li> <li>▪ Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas;</li> <li>▪ Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.</li> </ul>		
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan) yang responsif Gender.	
		Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	<p>a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan</p> <p>b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender</p>
SUMBER DANA	:	Rp. 17.936.975,-	
OUTCOMES	:	Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat RW, Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.	

**GENDER BUDGET STATEMENT  
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

OPD : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI  
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Kode Kegiatan	7.01.03.2.03.01		
Analisis Situasi	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan ( Data Pilah Gender )</b> Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mempunyai 6 Kelurahan. Setiap Kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Wanita</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p>LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki, sedangkan PKK dalam Pengurusannya 100% didominasi oleh Perempuan sehingga menimbulkan kesenjangan. RT/RW ketuanya didominasi oleh Laki-laki sehingga juga menimbulkan kesenjangan</p> <p><b>b. Faktor Kesenjangan Internal OPD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan.</li> <li>• PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan.</li> <li>• RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan</li> </ul> <p><b>c. Faktor Kesenjangan Eksternal OPD :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan;</li> <li>• Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</li> <li>• Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.</li> <li>• Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan sehingga pengurusan kepengurusan di dominasi perempuan</li> </ul>		
Rencana Tindak	Kegiatan		
		Tujuan	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki2 dan perempuan yang proporsional
		Aktivitas	1. Dalam Penetapan SK Kepengurusan LPM, PKK, RT/RW

			<p>memperhatikan Persentase Keikutserataan Laki Laki dan perempuan yang seimbang</p> <p>2. Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala</p> <p>3. Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK LPM ataupun RT /RW</p>
Sumber Dana	Rp. 38.293.650		
Dampak / Hasil / Manfaat	<b>outcomes:</b> Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan		

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A
3	Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%



